

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini di daerah setelah berlakunya Undang-undang Pemerintahan Daerah untuk mendirikan provinsi dan kabupaten/kota baru adalah salah satu fenomena menarik untuk dikaji dan dipahami dalam hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Berbagai alasan dikemukakan untuk menuntut adanya provinsi dan kabupaten/kota baru itu diantaranya, daerah memiliki potensi yang memadai secara ekonomi untuk menunjang pembangunan daerahnya, ingin mengelola sendiri pembiayaan pembangunan daerahnya atau luasnya (wilayah geografis) daerah dan ingin memberikan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat serta sejumlah alasan lainnya.

Pemekaran daerah di Indonesiamerupakan pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Secara khusus, pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru dibentuk untuk menggantikannya. Pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Diharapkan dengan adanya kewenangan di pemerintah daerah maka akan membuat proses pembangunan,

pemberdayaan dan pelayanan yang signifikan. Prakarsa dan kreativitasnya terpacu karena telah diberikan kewenangan untuk mengurus daerahnya. Sementara di sisi lain, pemerintah pusat tidak lagi terlalu sibuk dengan urusan-urusan domestik. Ini agar pusat bisa lebih berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro strategis serta lebih punya waktu untuk mempelajari, memahami, merespon, berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat darinya.

Faktor geografi adalah variabel yang terkait dengan pemekaran wilayah sebagai akibat munculnya ikatan-ikatan yang bermotif politik pada masyarakat yang tinggal di suatu daerah. Latar belakang kesatuan geografis itu dihubungkan oleh suatu ikatan secara politis. Kuat lemahnya ikatan tersebut sangat bergantung kepada seberapa besar daya tarik politik terhadap hadirnya kesatuan masyarakat sebagai suatu kesatuan politis.

Hal yang paling penting dalam aspek geografi ini adalah adanya perasaan menyatu dari sekelompok masyarakat sebagai akibat dari adanya hubungan kesatuan wilayah secara geografis. Pada awal kemunculannya, mungkin saja perasaan sebagai suatu kesatuan tersebut tidak begitu kuat. Tetapi karena perkembangan faktor-faktor eksternal yang memicu perasaan bersatu tersebut, maka dorongan untuk menggali ikatan-ikatan tersebut kembali muncul. Berbagai kasus pemekaran yang terjadi saat ini, sebetulnya banyak terkait dengan aspek politik (Smith, 1985:13).

Pandangan ini menjadi pembenaran terwujudnya pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah tidak akan terbentuk jika tidak terdapat jalinan ikatan politis antara masyarakat dengan wilayah tinggalnya. Sebagai bentuk dan aktualisasi politik,

pemekaran wilayah harus memiliki landasan dasar yang kuat secara politis, sehingga mampu memberi identitas baru yang merepresentasikan perasaan-perasaan masyarakat dalam bentuk yang sangat khas (Smith, 1985:27).

Aspek geografis, mengasumsikan bahwa kondisi geografis suatu daerah akan berpengaruh terhadap pembentukan identitas suatu kelompok masyarakat yang akhirnya akan berkembang menjadi satu kesatuan politik. Misalnya masyarakat daerah pantai, gunung atau pulau. Masyarakat yang terpisah secara geografis, cenderung membentuk komunitas tersendiri dan akan menjadi dasar pembentukan kelompok masyarakat.

Geografi menjadi batas yuridiksi wilayah yang ditempati oleh sekelompok masyarakat yang menjadi syarat terbentuknya pemekaran wilayah. Perbedaan geografi dapat menjadi dasar terbentuknya suatu identitas bersama suatu kelompok, juga pembentuk perbedaan karakteristik wilayah, masalah, dan kewenangan masing-masing wilayah. Selain itu didukung juga dengan adanya konsep dasar geografi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan dalam pemekaran suatu wilayah.

Diferensiasi area merupakan salah satu dari konsep dasar geografi yang dapat menggambarkan adanya perbedaan suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya, karena setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dalam hal ini yang akan menjadi objek kajiannya adalah Pesawaran. Pesawaran merupakan suatu daerah yang ada di Provinsi Lampung. Banyaknya potensi yang terdapat di Pesawaran menjadikan Pesawaran berbeda dengan daerah-daerah lain yang ada di

Provinsi Lampung. Adanya perbedaan tersebut dapat membentuk karakteristik, kondisi, kepentingan dan masalah, serta potensi tersendiri di Pesawaran.

Pesawaran memiliki banyak potensi di bidang pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, tambang dan mineral, serta jasa dan penunjang. Potensi tersebut juga didukung oleh faktor lain seperti kemampuan ekonomi, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, serta luas daerah yang memungkinkan untuk terselenggaranya pemekaran wilayah.

Dalam Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2007, tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, disebutkan bahwa pemekaran wilayah berarti pemecahan wilayah daerah yang telah ada, dengan mempertimbangkan berbagai faktor di daerah. Pertimbangan faktor-faktor itu diantaranya; (1) kemampuan ekonomi, (2) potensi daerah (3) sosial budaya, (4) sosial politik, (5) jumlah penduduk, (6) luas daerah, dan (7) pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya pemekaran wilayah. Tentunya tuntutan masyarakat untuk membentuk daerah-daerah baru harus mengacu kepada pertimbangan atau kriteria di atas, sebab bila tidak tepat pertimbangan yang diberikan untuk pemekaran wilayah hanya akan memberikan makna yang tidak penting dan tidak berarti bagi masyarakat.

Pemekaran wilayah Pesawaran dengan segala potensi yang terkandung di dalamnya sangat diharapkan oleh berbagai pihak, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di Pesawaran. Banyaknya tuntutan untuk menjadikan Pesawaran sebagai daerah otonomi baru, maka pada tanggal 16 April 2001 dibentuklah Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Pesawaran (P3KP).

Berdasarkan usulan yang dilakukan oleh P3KP maka pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Lampung melakukan penelitian dan pengkajian tentang kelayakan Kabupaten Lampung Selatan untuk dimekarkan menjadi dua kabupaten. Berdasarkan luas Kabupaten Lampung Selatan yaitu 3.283,51 km² dan jumlah penduduk yang mencapai 1.311.338 jiwa, maka Kabupaten Lampung Selatan layak dimekarkan menjadi dua kabupaten dengan kabupaten pemekarannya adalah Kabupaten Pesawaran.

Berkat perjuangan P3KP maka pada tanggal 17 Juli 2007 DPR RI menyetujui pembentukan Kabupaten Pesawaran yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung dengan luas 1.173,77 km², dan dengan jumlah penduduk 398.848 jiwa, serta 7 wilayah kecamatan dan 133 kelurahan.

Adapun tujuan dibentuknya Kabupaten Pesawaran yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, peningkatan pertumbuhan kehidupan masyarakat, peningkatan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan ketertiban dan keamanan.

Pemekaran wilayah tersebut, cepat atau lambat akan berpengaruh terhadap masing-masing kecamatan, bahkan berpengaruh juga terhadap desa. Salah satu desa yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah Desa Bagelen Kecamatan Gedongtataan. Dengan jumlah penduduk 7358 jiwa dan 1856 kepala keluarga, diharapkan Desa Bagelen dapat mewakili sabagai bukti terwujudnya tujuan dari pemekaran wilayah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana persepsi masyarakat tentang kesejahteraan masyarakat setelah pemekaran wilayah dengan judul Persepsi Masyarakat Tentang Kesejahteraan Masyarakat Desa Bagelen Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran Setelah Pemekaran Wilayah Tahun 2012.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas dapat diidentifikasi masalah yang kemungkinan berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang kesejahteraan masyarakat Desa Bagelen Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran setelah pemekaran wilayah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomimasyarakat.
3. Peningkatan pembangunan perekonomian daerah.
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemekaran Kabupaten Pesawaran memberikan kemudahan dalam pelayanan masyarakat?

2. Apakah pemekaran Kabupaten Pesawaran dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat?
3. Apakah pemekaran Kabupaten Pesawaran dapat meningkatkan pembangunan perekonomian daerah?
4. Apakah pemekaran Kabupaten Pesawaran dapat mempercepat pengelolaan potensi daerah?
5. Apakah pemekaran Kabupaten Pesawaran dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan:

1. Untuk mendapatkan informasi tentang kemudahan dalam pelayanan masyarakat setelah pemekaran Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk mendapatkan informasi tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat setelah pemekaran Kabupaten Pesawaran.
3. Untuk mendapatkan informasi tentang peningkatan pembangunan perekonomian daerah setelah pemekaran Kabupaten Pesawaran.
4. Untuk mendapatkan informasi tentang percepatan pengelolaan potensi daerah setelah pemekaran Kabupaten Pesawaran.
5. Untuk mendapatkan informasi tentang peningkatan keamanan dan ketertiban setelah pemekaran Kabupaten Pesawaran.

E. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
2. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan sosial yang diperoleh di perguruan tinggi khususnya yang berhubungan dengan kajian geografi, yaitu geografi desa dan geografi ekonomi.
3. Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran kepada pihak terkait tentang kondisi Desa Bagelen Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran dalam hal kesejahteraannya.
4. Sebagai suplemen bahan ajar pada mata pelajaran geografi SMA Kelas X (sepuluh) tentang Konsep Dasar Geografi.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang dilakukan adalah:

1. Ruang Lingkup Subjek, yaitu masyarakat Desa Bagelen Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran.
2. Ruang Lingkup Objek, yaitu persepsi masyarakat Desa Bagelen tentang kesejahteraannya setelah pemekaran Kabupaten Pesawaran.
3. Ruang Lingkup Tempat, yaitu di Desa Bagelen Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran.
4. Ruang Lingkup Waktu, yaitu tahun 2012.
5. Ruang Lingkup Ilmu, yaitu Geografi Perencanaan dan Pembangunan Wilayah.

Setiap wilayah memiliki karakteristik sendiri yang tidak dimiliki wilayah lain, baik secara fisik dan non fisik. Geografi Perencanaan dan Pembangunan Wilayah adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara perencanaan dan pembangunan wilayah. Dalam hal ini, perencanaan dan pembangunan wilayah dapat berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial terutama terkait dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga sangat bersinggungan dengan konsep-konsep dan teori-teori sosial yang ada.